

**IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
DI SEKOLAH DASAR**

Juliana

FKIP Universitas Katolik Santo Thomas

Email: anna.jait@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan terus mengalami dinamika dan perkembangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program “Merdeka Belajar”. Salah satu pokok kebijakan tersebut adalah mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi merdeka belajar dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, berdasarkan konsep Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat kaku. Sehingga, kebijakan merdeka belajar dalam pemangkas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari yang awalnya 13 komponen menjadi 3 komponen dianggap lebih efisien dan efektif, yang nantinya guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. *Kedua*, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memiliki dan memerhatikan prinsip utamanya, yaitu: (1) efisien, penyusunan RPP harus efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga; (2) efektif, penyusunan RPP harus efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran; dan (3) berorientasi pada peserta didik, berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. *Ketiga*, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap Tema pembelajaran di SD dianggap lebih efektif dan efisien, karena guru menjadi lebih fokus terhadap penguasaan materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar juga memberikan waktu terhadap guru untuk istirahat serta mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran dengan kualitas mengajar yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: merdeka belajar, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

p-ISSN 2648-8600

e-ISSN 2745-410X

Volume 4 Nomor 2 Desember 2021

ABSTRACT

Along with the times, the world of education continues to experience dynamics and developments. The Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim, has established 4 main policies in the national education sector through the "Freedom of Learning" program. One of the main points of the policy is the Learning Implementation Plan (RPP). Based on this, the researcher aims to describe the implementation of independent learning in the preparation of the Learning Implementation Plan (RPP). The method used in this research is content analysis method with qualitative descriptive. The results of this study indicate that, first, based on the concept of the Learning Implementation Plan (RPP) with the existing format, it is considered rigid. Thus, the independent learning policy in trimming the Learning Implementation Plan (RPP) from the original 13 components to 3 components is considered more efficient and effective, which will give teachers more time to prepare and evaluate the learning process. Second, the preparation of the Learning Implementation Plan (RPP) must have and pay attention to the main principles, namely: (1) efficient, the preparation of the RPP must be efficient, which means that the RPP is written correctly and does not spend a lot of time and energy; (2) to be effective, the preparation of the lesson plans must be effective, meaning that the writing of the lesson plans is carried out to achieve learning objectives; and (3) student-oriented, meaning that the writing of lesson plans is carried out by considering the readiness, interest, and learning needs of students in class, so that later it can increase students' interest in learning. Third, the simplification of the Learning Implementation Plan (RPP) for each learning theme in elementary schools is considered more effective and efficient, because the teacher becomes more focused on mastering the subject matter which will later be conveyed to students. In addition, the one-sheet Learning Implementation Plan (RPP) also gives teachers time to rest and prepare and evaluate learning with better teaching quality.

Keywords: independent learning, lesson plan (RPP)

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang besar dalam perkembangan zaman. Pendidikan memberikan arahan pada seseorang dan dapat menciptakan generasi yang baik dan memiliki kualitas yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman dunia pendidikan terus mengalami dinamika dan perkembangan.

Perkembangan ini tidak menutup kemungkinan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar". Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan

p-ISSN 2648-8600

e-ISSN 2745-410X

Volume 4 Nomor 2 Desember 2021

dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Merdeka belajar dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Program merdeka belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan. Salah satunya keluhan soal banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu.

Program “Merdeka Belajar” ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta pada 11 Desember 2019 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program “Merdeka Belajar” ini meliputi a) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Hal ini berimplikasi pada guru dan satuan pendidikan lebih merdeka dalam

menilai belajar peserta didik, b) Ujian Nasional (UN) tahun 2021 diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang meniscayakan penyesuaian tata kelola penilaian pembelajaran di level satuan pendidikan maupun level nasional, c) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berimplikasi pada kebebasan guru untuk dapat memilih, membuat, dan menggunakan format RPP secara efektif dan efisien sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mengelola pembelajaran. d) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah. Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul melalui pendidikan. Hal krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru yang berdaya dan memberdayakan. Melalui kebijakan ini diharapkan guru-guru tidak lagi terjebak dengan kebijakan administrasi sehingga

waktu yang dimiliki guru lebih banyak untuk mengembangkan ide-ide kreatif untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang mendidik anak menjadi manusia merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya (Istiq'faroh, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran atau Siaran PERS Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019 tentang Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” dimana salah satu pokok kebijakan tersebut adalah mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang selama ini dianggap cukup membebani administrasi guru. Selanjutnya, Siaran Pers ini dipertegas kembali dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP yang mana Kemendikbud kedepannya akan menyederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Di dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan

dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik.

2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah: tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian (assesmen), sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap.
3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), serta individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik.
4. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3.

Dalam mengaplikasikan program pembelajaran yang telah ditulis di silabus, guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran maksimal di kelas untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertulis dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian, dan penguasaan kompetensi dasar. Di Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, dan sekarang ini Kemendikbud mengubah perangkat yaitu RPP dirampingkan menjadi 1 lembar. Guna mendukung “Merdeka Belajar”, penyelarasan pembelajaran perlu dilaksanakan. Penyelarasan tersebut diupayakan melalui penyederhanaan format RPP tanpa mengurangi hakikat dan urgensi dari RPP.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan *Implementasi Merdeka Belajar dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran*

(RPP) di Sekolah Dasar. Sehingga, dapat diketahui bagaimana bentuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berlaku sesuai kebijakan saat ini khususnya di sekolah dasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu serta mempermudah guru dalam memahami dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dengan deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara meringkas data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti sebagai pengumpul data karena peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data, yaitu menentukan sumber data, mencatat data, meneliti data, dan menarik kesimpulan. Data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, yang terdapat pada Surat Edaran atau Siaran PERS Nomor:

408/sipres/A5.3/XII/2019 tentang Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”. Sumber data penelitian ini berasal dari Empat Pokok “Merdeka Belajar” berfokus pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Proses diperolehnya data dari sumber data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Validitas penelitian ini menggunakan validitas semantik dan reliabilitas berupa realibilitas intrariter, karena diteliti oleh peneliti sendiri lebih dari dua kali dengan jangka waktu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan masalah yang diteliti, fokus pembahasan pada penelitian ini adalah analisis konten *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)* dilihat dari *Kebijakan Merdeka Belajar*. Khususnya, penyusunan RPP di sekolah dasar. Pembahasan tentang analisis konten dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal yaitu konsep penyederhanaan penyusunan RPP, prinsip penyederhanaan RPP, dan implementasi penyederhanaan RPP di

sekolah dasar. Pembahasan akan dipaparkan perkatagori sehingga data dalam penelitian dapat lebih mudah disimpulkan secara umum.

1. Konsep Penyederhanaan Penyusunan RPP

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Belasan komponen RPP ini dalam kebijakan merdeka belajar disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat dalam satu halaman, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Tujuannya tetap sama yaitu perencanaan pembelajaran sebelum masuk kelas.

Berdasarkan konsep Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat kaku. Selain itu format yang ada terlalu

banyak dengan 13 komponen dalam satu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Adapun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh guru per-Kompetensi Dasar (KD) sesuai bidang studi yang diampunya yang mana dianggap terlalu memberatkan. Dengan demikian, kebijakan merdeka belajar dalam pemangkasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari yang awalnya 13 komponen menjadi 3 komponen ini yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran dianggap lebih efisien dan efektif. Nantinya, guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Tanpa mengurangi hakikat dan urgensi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rumusan komponen dan jumlah halaman disederhanakan menjadi 3 (tiga) komponen dan disajikan dalam 1 (satu) halaman. Penyederhanaan tersebut menjadi salah satu upaya memerdekakan guru dari beban administrasi. Dengan penyederhanaan RPP menjadi 3 (tiga) komponen

dalam 1 (satu) halaman dapat memerdekakan guru dan meningkatkan kualitas dalam mempersiapkan materi dan juga penyampaiannya pada peserta didik.

2. Prinsip Penyederhanaan RPP

Alasan dasar melakukan penyederhanaan penyusunan RPP adalah karena guru sering diarahkan untuk menulis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan sangat rinci. Akibatnya, kegiatan menulis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan sangat rinci tersebut menghabiskan waktu lebih lama. Alokasi waktu tersebut yang mana seharusnya bisa difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Adapun penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memiliki dan memerhatikan prinsip utamanya, yaitu: efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. *Pertama*, penyusunan RPP harus efisien, yang berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. *Kedua*, penyusunan RPP harus efektif, yang berarti penulisan

RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. *Ketiga*, penyusunan RPP harus berorientasi pada peserta didik, yang berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.

Kebijakan Merdeka Belajar mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu halaman tidak masalah jika diterapkan saat ini, asalkan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi, dalam penyusunan RPP tidak memerlukan persyaratan banyaknya jumlah halaman. Selain itu, tidak ada standar baku dalam penulisan RPP, sehingga guru bebas untuk membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Guru juga memiliki kebebasan untuk menggunakan format RPP yang sudah dibuat sebelumnya, maupun memodifikasi menjadi format RPP satu halaman sesuai dengan prinsip

efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik.

Komponen penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam kebijakan merdeka belajar seperti yang telah disebutkan di atas, meliputi; tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, ditulis dengan merujuk pada Kurikulum 2013 dan juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sementara itu, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, dan penutup) dan assesment dalam RPP ditulis secara efisien sesuai dengan pembelajaran dan tentunya tidak membuang-buang waktu.

Hal yang penting dalam sebuah RPP bukan tentang penulisannya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Dengan RPP itu sendiri, nantinya guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran di kelas. Refleksi yang dimaksud adalah apakah hal yang ingin disampaikan sudah sesuai dengan apa yang tersampaikan

kepada peserta didik atau belum. Melalui refleksi yang dilakukan diharapkan guru mengetahui kelebihan, kelemahan dalam melakukan proses pembelajaran dan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dengan demikian, pada hakekatnya penulisan RPP dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak negeri.

Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar dengan format resmi dari Kemendikbud sesuai Surat Edaran No. 14 Tahun 2019 sesuai prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat seperti di bawah ini.

Berdasarkan analisis dari beberapa Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) terdahulu maupun saat ini di sekolah dasar yang disusun oleh Anizarita (2021) untuk kelas 1 SDN 012 di Kuala Terusan, bahwa RPP yang disusun sesuai dengan surat edaran Mendikbud No 14 tahun 2019 yaitu efisien dan efektif dalam penyusunannya. Hal tersebut berbeda dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru sebelum menggunakan format RPP merdeka belajar yaitu pada bagian awal RPP selain terdapat tujuan pembelajaran juga terdapat KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), dan materi yang terlalu panjang, sehingga terlalu memperbanyak halaman dan juga membuang-buang waktu. Pada langkah-langkah pembelajaran juga ditulis secara detail. Misalnya, menuliskan salam sebelum memulai pembelajar, mempresensi peserta didik, hingga menuliskan ulang materi-materi yang seharusnya tidak diperlukan.

Sementara itu, untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar yang digunakan saat ini dianggap lebih efisien dan efektif. Hal

tersebut disebabkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun satu lembar sudah dapat mencakup keseluruhan pembelajaran tanpa memaparkan KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), materi dan langkah-langkah pembelajaran secara luas. Dengan demikian, implementasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di sekolah dasar oleh guru lebih efektif dan efisien. Guru menjadi lebih fokus terhadap penguasaan materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar juga memberikan waktu terhadap guru untuk istirahat serta mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran dengan kualitas mengajar yang lebih baik lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis konten yang dilakukan terhadap Implementasi *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)* dilihat dari *Kebijakan Merdeka Belajar*, dari hasil penelitian dan pembahasannya dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan konsep Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat kaku. Sehingga, kebijakan merdeka belajar dalam pemangkasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari yang awalnya 13 komponen menjadi 3 komponen dianggap lebih efisien dan efektif, yang nantinya guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Kedua, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus memiliki dan memerhatikan prinsip utamanya, yaitu: (1) efisien, penyusunan RPP harus efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga; (2) efektif, penyusunan RPP harus efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran; dan (3) berorientasi pada peserta didik, berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga

nantinya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.

Ketiga, dalam implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di sekolah dasar dianggap lebih efektif dan efisien, karena guru menjadi lebih fokus terhadap penguasaan materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar juga memberikan waktu terhadap guru untuk istirahat serta mempersiapkan, mengevaluasi, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas mengajar yang lebih baik lagi.

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti bermaksud untuk memberi saran, yakni dalam Kebijakan Merdeka Belajar khususnya implementasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru harusnya diberikan sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu, karena tidak semua guru memahami Kebijakan Merdeka Belajar khususnya penyederhanaan RPP. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Buku Saku Tanya Jawab

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP ternyata masih banyak guru yang belum memahami kebijakan tersebut secara menyeluruh, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman guru. Peningkatan pemahaman guru dapat dilakukan dengan cara: membaca pedoman terkait kebijakan Merdeka Belajar, mengikuti kegiatan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG), seminar pembelajaran di sekolah atau Kabupaten/kota, diskusi dengan teman sejawat, pembimbingan dan pendampingan oleh pengawas sekolah dan juga kepala sekolah.

Selain itu, kapasitas *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) atau keterampilan penalaran tingkat tinggi para guru untuk “menganalisa, mengevaluasi dan mengkreasi” perlu ditumbuh kembangkan lagi sehingga guru dapat membuat rumusan isi RPP satu halaman sesuai dengan Kebijakan Merdeka Belajar saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anizarita. 2021. *RPP Daring Merdeka Belajar Berdasarkan Edaran MENDIKBUD No. 14 Tahun 2019. Jenjang SD/MI Kelas 1 Tema 6. Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri.*

<https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/27283-1614222034.pdf>

Istiq'faroh, N. (2020). *Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar Di Indonesia.* Lintang Songo: Jurnal Pendidikan, 3(2), 1–10.

<https://www.journal.unusida.ac.id/index.php/jls/article/view/266>

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

RI. *Surat Edaran Mendikbud tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nomor 14 Tahun 2019.*, (2019).

Surat Edaran atau Siaran PERS Kemendikbud Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019 tentang Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”.

Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).